



## Analisis Penerapan Akuntansi Desa Panggoi Kecamatan Muara Satu Dalam Penyusunan Laporan Realisasi APBDes

**Ulfa Nazila<sup>1</sup>, M. Furqan<sup>2</sup>, M. Zaky Firmansyah<sup>3</sup>, M. Arief<sup>4</sup>, Syawal Harianto<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Progam Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail: [ulfanazila04@gmail.com](mailto:ulfanazila04@gmail.com)<sup>1</sup>, [mhd.furqan26@gmail.com](mailto:mhd.furqan26@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[zakifirmansyah690@gmail.com](mailto:zakifirmansyah690@gmail.com)<sup>3</sup>, [mariefarief8848@gmail.com](mailto:mariefarief8848@gmail.com)<sup>4</sup>, [syawalharianto@pnl.ac.id](mailto:syawalharianto@pnl.ac.id)<sup>5</sup>

---

### Article Info

#### Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 04, 2026

Accepted January 08, 2026

---

#### Keywords:

*Village Accounting, APBDes,  
Budget Realization Report,  
Village Financial Management*

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of village accounting in Panggoi Village, Muara One District, in the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget Realization Report (APBDes). The implementation of village accounting is a crucial aspect in achieving transparent and accountable village financial governance in accordance with applicable regulations. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials directly responsible for village financial management. The results indicate that the implementation of village accounting in Panggoi Village has generally complied with existing regulations, particularly in the recording and preparation of the APBDes realization report. However, several challenges remain, including limited understanding of accounting principles among village officials and a high dependence on village financial system applications. Therefore, continuous capacity building and assistance are needed to optimize the implementation of village accounting and enhance transparency and accountability in village financial management.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

### Article Info

#### Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 04, 2026

Accepted January 08, 2026

---

#### Kata Kunci:

Akuntansi Desa, APBDes,  
Laporan Realisasi, Pengelolaan  
Keuangan Desa

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi desa di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Satu, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penerapan akuntansi desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi desa di Gampong Panggoi secara umum telah mengacu pada regulasi yang berlaku, khususnya terkait pencatatan dan penyusunan Laporan Realisasi APBDes. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip akuntansi serta ketergantungan pada aplikasi sistem keuangan desa.



Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan berkelanjutan agar penerapan akuntansi desa dapat berjalan lebih optimal dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



***Corresponding Author:***

Ulfa Nazila  
Politeknik Negeri Lhokseumawe  
E-mail: [ulfanazila04@gmail.com](mailto:ulfanazila04@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan secara mandiri, sehingga menuntut adanya sistem akuntansi desa yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntansi desa berperan penting sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya melalui penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (Irma, 2020).

Laporan Realisasi APBDes merupakan salah satu bentuk laporan keuangan desa yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa dalam satu periode anggaran. Laporan ini menjadi instrumen utama dalam menilai kinerja keuangan desa serta tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Menurut Irma (2020), penyusunan Laporan Realisasi APBDes yang baik harus didukung oleh penerapan akuntansi desa yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan akuntansi desa masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Putra (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, khususnya dalam pemahaman akuntansi dan pelaporan keuangan, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penyusunan laporan keuangan desa secara optimal. Selain itu, ketergantungan terhadap aplikasi sistem keuangan desa tanpa diimbangi pemahaman konsep akuntansi yang memadai juga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan pelaporan (Rahmawati, 2022). Di sisi lain, penerapan akuntansi desa yang baik terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan desa serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian oleh Nugroho dan Lestari (2023) menyatakan bahwa desa yang menerapkan sistem akuntansi secara konsisten dan sesuai regulasi cenderung memiliki laporan realisasi APBDes yang lebih akurat dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung good governance di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan akuntansi desa di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Satu, khususnya dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDes. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesesuaian praktik akuntansi desa dengan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan desa ke depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam penerapan akuntansi desa dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara 1. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara komprehensif terkait proses pencatatan, pelaporan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntansi desa.

Lokasi penelitian ditetapkan di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara 1, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu desa yang mengelola keuangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek penelitian meliputi aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, seperti keuchik, sekretaris desa, dan bendahara desa, karena mereka memiliki peran penting dalam penyusunan dan pelaporan realisasi APBDes.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan akuntansi desa, pemahaman aparatur desa terhadap sistem akuntansi, serta kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDes. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen keuangan desa seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, dan arsip pendukung lainnya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan akuntansi desa, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menginterpretasikan temuan penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan kepercayaan yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai penerapan akuntansi desa dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDes di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Satu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa di Gampong Panggoi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi desa di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Satu, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur desa telah melaksanakan proses pencatatan keuangan mulai dari penerimaan pendapatan, pelaksanaan belanja, hingga penyusunan laporan realisasi anggaran pada akhir periode. Pencatatan transaksi keuangan desa dilakukan secara rutin dan didukung oleh penggunaan aplikasi sistem keuangan desa sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan.

Dalam praktiknya, penyusunan Laporan Realisasi APBDes di Gampong Panggoi menunjukkan adanya kesesuaian antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dilaporkan. Laporan tersebut memuat informasi mengenai pendapatan desa, belanja desa, serta pembiayaan desa yang disajikan secara sistematis. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip akuntabilitas telah mulai diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan pendapat Irma (2020) yang menyatakan bahwa akuntansi desa berperan sebagai instrumen pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 3.X**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**  
*(Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Satu)*

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
1	<b>Pendapatan Desa</b>				
	Pendapatan Asli Desa	150.000.000	145.000.000	5.000.000	96,67
	Dana Transfer	1.200.000.000	1.200.000.000	0	100
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.345.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>99,63</b>
2	<b>Belanja Desa</b>				
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	450.000.000	440.000.000	10.000.000	97,78
	Bidang Pembangunan Desa	600.000.000	580.000.000	20.000.000	96,67
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	180.000.000	175.000.000	5.000.000	97,22
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.000.000	85.000.000	5.000.000	94,44
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.320.000.000</b>	<b>1.280.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>96,97</b>
3	<b>Pembiayaan Desa</b>				
	Penerimaan Pembiayaan	20.000.000	20.000.000	0	100
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	45.000.000	5.000.000	90
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>(30.000.000)</b>	<b>(25.000.000)</b>	<b>(5.000.000)</b>	—

*(Sumber: Dokumen APBes desa panggoi 2025)*

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan adanya beberapa kendala dalam penerapan akuntansi desa. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman aparatur

desa terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi. Sebagian aparatur desa masih bergantung pada aplikasi sistem keuangan desa tanpa sepenuhnya memahami konsep pencatatan dan pelaporan keuangan yang mendasarinya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penginputan data serta keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Putra (2021) yang menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang mengelola keuangan desa.

Selain itu, faktor pendampingan dan pengawasan juga memengaruhi kualitas penerapan akuntansi desa. Pendampingan dari pihak terkait, seperti pendamping desa dan pemerintah kecamatan, dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memberikan pemahaman teknis dan konseptual mengenai akuntansi desa. Rahmawati (2022) menyatakan bahwa pendampingan yang berkelanjutan dapat membantu aparatur desa dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Dari sisi transparansi, pemerintah Gampong Panggoi telah berupaya menyampaikan informasi keuangan desa kepada masyarakat melalui media informasi desa, seperti papan pengumuman dan laporan pertanggungjawaban tahunan. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam memahami dan mengawasi laporan realisasi APBDes masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat desa, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho dan Lestari (2023) bahwa transparansi keuangan desa perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat agar akuntabilitas dapat terwujud secara optimal.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi desa di Gampong Panggoi telah berjalan cukup baik dan mendukung penyusunan Laporan Realisasi APBDes. Namun, masih diperlukan upaya perbaikan, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, penguatan pendampingan teknis, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Dengan perbaikan tersebut, penerapan akuntansi desa diharapkan dapat semakin optimal dan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

## **B. Penerapan Akuntansi Desa dalam Penyusunan Laporan Realisasi APBDes**

Penerapan akuntansi desa dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Akuntansi desa berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan pemerintah desa untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode anggaran. Melalui penerapan akuntansi desa yang baik, pemerintah desa dapat menyajikan informasi keuangan yang menggambarkan kondisi realisasi anggaran secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemerintah atasnya. Irma (2020) menyatakan bahwa akuntansi desa memiliki peran strategis sebagai alat pertanggungjawaban publik dalam pengelolaan APBDes, terutama dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi desa di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Satu, telah dilaksanakan melalui proses pencatatan transaksi keuangan secara sistematis. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa dicatat sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Proses pencatatan ini dilakukan secara berkala dan didukung oleh penggunaan aplikasi sistem keuangan desa sebagai alat bantu dalam mengelola data keuangan. Penggunaan sistem ini mempermudah aparatur desa dalam menyusun Laporan Realisasi APBDes karena data keuangan telah tersusun secara otomatis berdasarkan kode akun yang tersedia. Hal ini sejalan dengan pendapat Sari dan Putra (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem keuangan desa dapat meningkatkan ketertiban administrasi dan ketepatan penyusunan laporan keuangan desa.

Laporan Realisasi APBDes yang disusun oleh pemerintah Gampong Panggoi memuat informasi mengenai perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa. Penyajian laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis, laporan realisasi anggaran telah disusun sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan desa. Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan instrumen utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, karena laporan ini menunjukkan sejauh mana anggaran telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan.

Namun demikian, penerapan akuntansi desa dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDes di Gampong Panggoi masih menghadapi beberapa keterbatasan. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah masih terbatasnya pemahaman aparatur desa terhadap konsep dasar akuntansi, sehingga proses pencatatan dan pelaporan keuangan cenderung bergantung pada aplikasi sistem keuangan desa. Kondisi ini menyebabkan aparatur desa kurang mampu melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Fauzi dan Ananda (2022) menyatakan bahwa ketergantungan pada sistem tanpa didukung pemahaman akuntansi yang memadai dapat berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan desa.

Selain itu, penerapan akuntansi desa juga dipengaruhi oleh faktor pendampingan dan pengawasan dari pihak terkait. Pendampingan teknis yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa aparatur desa memahami prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan secara benar. Nugroho dan Lestari (2023) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan akuntansi desa tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan intensitas pendampingan yang diterima oleh pemerintah desa.

Dengan demikian, penerapan akuntansi desa dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDes di Gampong Panggoi telah berjalan cukup baik dan mendukung tersusunnya laporan keuangan desa sesuai ketentuan. Namun, untuk meningkatkan kualitas laporan realisasi anggaran, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan akuntansi desa serta penguatan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **C. Penerapan Akuntansi Desa dalam Penyusunan Laporan Realisasi APBDes**

Penerapan akuntansi desa dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Akuntansi desa berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan untuk mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode anggaran. Melalui penerapan akuntansi desa yang tertib dan sistematis, pemerintah desa dapat menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Satu, penerapan akuntansi desa dimulai sejak tahap pelaksanaan anggaran, yaitu ketika kegiatan dan program desa mulai direalisasikan sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan. Setiap penerimaan pendapatan desa, baik yang bersumber dari dana transfer maupun pendapatan asli desa, dicatat secara kronologis dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis pendapatan yang berlaku. Demikian pula dengan belanja desa, setiap pengeluaran dicatat berdasarkan bidang, kegiatan, dan jenis belanja yang telah dianggarkan. Proses pencatatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan desa terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.

Dalam praktiknya, penerapan akuntansi desa di Gampong Panggoi didukung oleh penggunaan sistem keuangan desa sebagai alat bantu pencatatan dan pengolahan data keuangan. Sistem ini memudahkan aparatur desa dalam mengelola transaksi keuangan karena telah menyediakan format pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data yang telah diinput ke dalam sistem kemudian diolah menjadi laporan keuangan desa, termasuk Laporan Realisasi APBDes. Dengan adanya sistem tersebut, proses penyusunan laporan realisasi anggaran menjadi lebih terstruktur dan efisien. Laporan Realisasi APBDes yang dihasilkan menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi yang telah dicapai selama satu tahun anggaran. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan desa, belanja desa, serta pembiayaan desa secara menyeluruh. Penyajian laporan realisasi anggaran menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan menilai sejauh mana program dan kegiatan desa telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Meskipun penerapan akuntansi desa dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDes di Gampong Panggoi telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pemahaman aparatur desa terhadap konsep dasar akuntansi masih perlu ditingkatkan agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga didukung oleh pemahaman yang memadai. Pemahaman tersebut penting agar aparatur desa mampu melakukan pengawasan internal dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi desa di Gampong Panggoi telah mendukung tersusunnya Laporan Realisasi APBDes sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Penerapan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan pengendalian internal tetap diperlukan agar penerapan akuntansi desa dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan desa.

#### **D. Kendala dalam Penerapan Akuntansi Desa**

Meskipun penerapan akuntansi desa di Gampong Panggoi telah berjalan, penelitian ini menemukan adanya beberapa kendala yang memengaruhi kualitas penyusunan Laporan Realisasi APBDes. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi. Sebagian aparatur desa masih mengandalkan aplikasi sistem keuangan desa tanpa memahami konsep pencatatan dan pelaporan keuangan secara mendalam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penginputan data serta kurangnya kemampuan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam penerapan akuntansi desa. Aparatur desa sering kali merangkap tugas administrasi lainnya, sehingga fokus terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan desa menjadi kurang optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dan Putra (2021) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan beban kerja aparatur desa yang mengelola keuangan.

Kendala lainnya adalah keterbatasan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Meskipun terdapat pendamping desa dan pengawasan dari pemerintah kecamatan, intensitas pendampingan masih dirasakan belum optimal, terutama dalam memberikan pemahaman konseptual mengenai akuntansi desa. Rahmawati (2022) menegaskan bahwa pendampingan yang berkesinambungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa secara akurat.

#### **E. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Realisasi APBDes**

Dalam aspek transparansi, pemerintah Gampong Panggoi telah berupaya menyampaikan informasi keuangan desa kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti papan informasi desa dan laporan pertanggungjawaban tahunan. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa untuk membuka akses informasi keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian, tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Laporan Realisasi APBDes masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami isi laporan keuangan desa, sehingga fungsi pengawasan masyarakat belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi informasi belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat desa. Nugroho dan Lestari (2023) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa harus diiringi dengan partisipasi aktif masyarakat agar akuntabilitas dapat terwujud secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah desa untuk tidak hanya menyampaikan laporan keuangan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isi dan makna dari laporan tersebut.

#### **F. Pembahasan Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntansi desa di Gampong Panggoi telah memberikan kontribusi positif terhadap penyusunan Laporan Realisasi APBDes. Penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan desa memungkinkan pemerintah desa untuk menyajikan informasi keuangan secara lebih tertib dan terstruktur. Namun, efektivitas



penerapan akuntansi desa masih sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan dukungan pendampingan teknis.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan akuntansi desa tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur desa dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi secara benar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan realisasi APBDes serta mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi desa di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Satu, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada umumnya telah berjalan dengan cukup baik dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa telah dilaksanakan secara sistematis dengan dukungan aplikasi sistem keuangan desa, sehingga laporan realisasi APBDes dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa.

Meskipun demikian, penerapan akuntansi desa tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi serta ketergantungan pada penggunaan aplikasi tanpa didukung pemahaman konseptual yang memadai. Selain itu, pendampingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa juga masih perlu ditingkatkan agar transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara optimal.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa serta penguatan pendampingan teknis dan pengawasan menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna mendukung penerapan akuntansi desa yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDes di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Satu.

## **SARAN**

Pemerintah Gampong Panggoi disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan akuntansi desa secara berkelanjutan, sehingga pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi tidak hanya bergantung pada penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, tetapi juga didukung oleh kemampuan analisis dan pengendalian internal yang memadai.

Pemerintah desa perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan meningkatkan keterbukaan informasi Laporan Realisasi APBDes kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa agar pengelolaan APBDes dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Irma, A. (2020). Penerapan akuntansi desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(2), 45–56.
- Sari, D. P., & Putra, R. A. (2021). Kompetensi aparatur desa dan kualitas laporan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1), 23–34.
- Rahmawati, N. (2022). Peran sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas laporan realisasi APBDes. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 7(2), 101–112.
- Nugroho, A., & Lestari, E. (2023). Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(1), 67–78.
- Wahyuni, S., & Hidayat, M. (2020). Analisis penerapan akuntansi desa berbasis regulasi pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik*, 4(3), 89–100.
- Putri, A. R., & Kurniawan, D. (2021). Implementasi laporan realisasi anggaran APBDes dalam mendukung good governance desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 55–66.
- Fauzi, M., & Ananda, R. (2022). Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pelaporan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 1–12.
- Saputra, Y., & Sulastri, E. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui laporan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12(2), 134–145.
- Handayani, T., & Prasetyo, B. (2024). Evaluasi penerapan sistem akuntansi desa dalam penyusunan APBDes. *Jurnal Akuntansi Publik dan Kebijakan*, 11(1), 20–32.
- Rizki, A., & Maulana, F. (2024). Tantangan penerapan akuntansi desa dalam pelaporan keuangan desa. *Jurnal Keuangan Daerah*, 6(1), 78–90.